



Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pelaksanaan Program Pemerintah Desa Ombolata Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Lifeit Darmil Gea¹, Eliagus Telaumbanua², Odaligoziduhu Halawa³, Robin Markus Putra Waruwu⁴

Alamat: Jl. Karet No.30, Ps. Gn. Sitoli, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Fakultas Ekonomi Universitas Nias

*Penulis Korespondensi: lifeitdarmilg@gmail.com, eliagus.tel@gmail.com, oda15halawa@gmail.com,
robinmarkusputrawaruwu@unias.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of management functions in the execution of government programs in Ombolata Idanoi Village, Gunungsitoli Idanoi District. The research focuses on four key management functions: planning, organizing, actuating, and controlling, as well as the supporting and inhibiting factors in their implementation. A qualitative approach was employed, using interviews, observations, and documentation with the village head, village officials, and community members as data sources. The findings reveal that program planning was conducted through village meetings, yet community participation remained low. Organizing was carried out based on the established structure, but limited human resources and budget constraints posed major challenges. The implementation of physical programs, such as road and health facility development, was successful due to strong community cooperation. However, non-physical programs such as economic empowerment were less effective. Control functions were mostly administrative and lacked active community involvement. The main supporting factors included village funds, community solidarity, and technical support from the city government, while inhibiting factors involved budget limitations, inadequate human resources, low community participation, and weak socialization. This study highlights the importance of optimizing management functions to enhance the effectiveness of village government programs.*

Keywords: *Management functions, village government, village programs, community participation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaan program pemerintah Desa Ombolata Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Fokus penelitian diarahkan pada empat fungsi manajemen utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa, namun partisipasi masyarakat masih rendah. Pengorganisasian telah dilaksanakan sesuai struktur kerja, tetapi terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala utama. Pelaksanaan program fisik, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan, berjalan baik karena didukung gotong royong masyarakat. Namun, program non-fisik seperti pemberdayaan ekonomi kurang optimal. Fungsi pengawasan lebih banyak bersifat administratif dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Faktor pendukung utama adalah adanya dana desa, semangat gotong royong, dan dukungan pemerintah kota, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya SDM, minimnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya sosialisasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan fungsi manajemen secara optimal untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah desa.

Kata Kunci : Fungsi manajemen, pemerintah desa, program desa, partisipasi masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut sangat ditentukan oleh

Naskah Masuk: 12 Januari 2026; Revisi: 09 Februari 2026; Diterima: 12 Maret 2026; Tersedia: 12 April 2026; Terbit: 17 Mei 2026;

kemampuan pemerintah desa dalam menerapkan fungsi manajemen yang baik, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian. Pemerintah desa memainkan peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam menerapkan fungsi manajemen yang baik. Proses manajemen ini mencakup beberapa tahapan yang saling terkait, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian. Setiap tahap memiliki tantangan dan peluang yang unik, serta memerlukan pendekatan yang cermat untuk mencapai hasil yang optimal.

Menurut Siagian (2015), fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) merupakan fondasi yang harus dijalankan secara terpadu agar organisasi mampu mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Hal senada juga disampaikan oleh Terry (2016) yang menyatakan bahwa manajemen yang baik bukan hanya mengandalkan kemampuan teknis, tetapi juga membutuhkan kemampuan dalam mengelola sumber daya, mengatur strategi, serta mengontrol pelaksanaan agar sesuai dengan rencana yang telah dibuat

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui survei, diskusi kelompok, atau forum musyawarah desa. Misalnya, jika masyarakat di desa tersebut menginginkan peningkatan akses terhadap pendidikan, pemerintah desa harus merumuskan program yang spesifik dan terukur. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi kurikulum yang sesuai dan mengembangkan infrastruktur sekolah yang memadai. Dengan demikian, perencanaan yang matang tidak hanya mengacu pada data statistik, tetapi juga memperhatikan aspirasi dan harapan masyarakat.

Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah pengorganisasian. Pada tahap ini, pemerintah desa harus mampu mengalokasikan sumber daya yang ada dengan efisien. Misalnya, jika desa memiliki dana terbatas, maka pemerintah desa perlu memprioritaskan program yang paling mendesak dan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Pengorganisasian juga mencakup pembentukan tim kerja yang kompeten, di mana masing-masing anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Dalam banyak kasus, pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam tim ini, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap program yang dijalankan.

Selanjutnya, pelaksanaan program merupakan tahap yang krusial. Di sinilah semua rencana yang telah disusun mulai diimplementasikan. Penting bagi pemerintah desa untuk

memastikan bahwa setiap langkah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Misalnya, jika program yang dijalankan adalah pelatihan keterampilan bagi pemuda, maka pemerintah desa harus memastikan bahwa pelatihan tersebut dilaksanakan oleh instruktur yang berpengalaman dan dalam suasana yang kondusif. Selain itu, komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, pelaksanaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Tahap terakhir dalam proses manajemen adalah pengendalian. Pada tahap ini, pemerintah desa perlu melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini bisa berupa pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, jika tujuan program adalah meningkatkan tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan dasar, maka pemerintah desa harus mengumpulkan data tentang jumlah anak yang terdaftar dan tingkat kehadiran mereka. Dengan analisis yang mendalam terhadap data ini, pemerintah desa dapat menentukan apakah program tersebut berhasil atau perlu diperbaiki. Pengendalian juga mencakup penyusunan laporan yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan hasil dari program yang telah dijalankan.

Di Desa Ombolata, dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan program-program pemerintah desa mengalami berbagai tantangan. Beberapa program yang telah direncanakan tidak berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, baik dari segi waktu, anggaran, maupun hasil yang diharapkan. Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah program kelompok tani yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Program ini mengalami berbagai hambatan mulai dari perencanaan yang kurang matang, kurangnya koordinasi antara pihak terkait, hingga lemahnya pengawasan di lapangan. Akibatnya, program tersebut tidak mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat sasaran.

Fenomena ini menimbulkan berbagai kritikan dan sorotan dari masyarakat terhadap efektivitas kerja pemerintah desa. Masyarakat mempertanyakan komitmen dan profesionalisme aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di sisi lain, terdapat pula beberapa program yang berhasil dilaksanakan dengan baik dan mendapat apresiasi, karena dinilai tepat sasaran dan berkelanjutan, seperti program infrastruktur jalan lingkungan dan program kesehatan masyarakat yang pelaksanaannya berjalan sesuai rencana. Selain itu, Handoko (2018) menekankan bahwa keberhasilan organisasi, termasuk organisasi pemerintahan desa, sangat bergantung pada kemampuan manajerial yang dijalankan oleh pemimpin dan aparatur di dalamnya. Ketidakmampuan dalam menerapkan fungsi manajemen yang baik dapat menyebabkan program yang telah dirancang tidak memberikan hasil yang optimal, bahkan gagal.

2. KAJIAN TEORITIS

Fungsi manajemen merupakan serangkaian proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut George R. Terry (dalam Sonya Liani Nasution, dkk., 2023), fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Perencanaan menjadi tahap awal yang sangat penting karena menentukan tujuan, arah, dan strategi organisasi. Tanpa perencanaan yang baik, organisasi berisiko mengalami pemborosan sumber daya serta kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perencanaan juga berfungsi sebagai dasar evaluasi dan membantu organisasi menghadapi ketidakpastian.

Tahap berikutnya adalah pengorganisasian dan penggerakan. Pengorganisasian bertujuan mengatur sumber daya agar bekerja secara terstruktur dan terkoordinasi, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab. Setelah itu, penggerakan (*actuating*) berfokus pada upaya memotivasi dan mengarahkan anggota organisasi agar bekerja optimal. Menurut Peter F. Drucker (2007), manajemen adalah seni membuat orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sehingga kemampuan kepemimpinan dan hubungan antar manusia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan organisasi.

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang berperan dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana melalui proses pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif. Keempat fungsi manajemen ini saling berkaitan dan berlangsung secara berkelanjutan. Dalam perspektif modern, manajemen juga harus memperhatikan aspek etika dan tanggung jawab sosial. Menurut Philip Kotler (2011), keputusan manajemen harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan organisasi semata.

Dalam konteks program pemerintah desa, penerapan fungsi manajemen sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program harus berbasis kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Supriyanto (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga terbukti meningkatkan efektivitas program (Nurhayati, 2021). Untuk menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, diperlukan strategi seperti pelatihan SDM (Wibowo, 2020/2022), peningkatan komunikasi, serta pemanfaatan teknologi agar program desa dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan..

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh, menganalisis, menggambarkan, dan menginterpretasikan peristiwa yang terjadi secara langsung di lokasi penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena

secara mendalam melalui interaksi sosial dengan informan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam guna memperoleh informasi yang komprehensif sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Menurut Sugiyono (2018:213), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat tertentu dan digunakan untuk meneliti kondisi yang bersifat alamiah. Metode ini menekankan pada makna daripada generalisasi, dengan teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif serta analisis yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian kualitatif berfokus pada aktivitas sosial, sikap, serta persepsi individu maupun kelompok dalam memahami suatu peristiwa atau objek penelitian.

Dalam pelaksanaannya, peneliti kualitatif dituntut memiliki pemahaman yang luas mengenai konteks sosial yang berkembang di lingkungan penelitian, serta kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dalam melakukan wawancara. Keterampilan tersebut sangat penting agar peneliti mampu menggali informasi secara akurat dan mendalam dari para informan. Keterbatasan dalam penguasaan teknik kualitatif dapat menjadi kendala dalam proses pengumpulan data, terutama dalam membangun interaksi yang efektif dengan narasumber.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, metode kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat sebagai informan. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid dan relevan dalam menggambarkan fenomena yang diteliti secara menyeluruh.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan program pemerintah desa pada umumnya dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok tani. Namun keterlibatan masyarakat masih belum maksimal karena tidak semua warga hadir. Kepala Desa, Yosafati Gea, menyampaikan bahwa *“perencanaan dilakukan lewat musyawarah desa, tetapi hanya sebagian masyarakat yang hadir sehingga keputusan sering hanya diwakili oleh beberapa orang.”* Hal ini dikuatkan oleh Sekretaris Desa, Setianus Gea, yang mengatakan *“dokumen perencanaan memang disusun dari hasil musyawarah, tetapi data dari masyarakat sering tidak lengkap sehingga sulit menentukan prioritas.”* Dari sisi masyarakat, Medina Laoli menambahkan *“informasi program kadang mendadak, jadi kami sulit memberi masukan.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa perencanaan program masih menghadapi kendala pada tingkat partisipasi dan sosialisasi.

Pengorganisasian sumber daya manusia, dana, dan waktu telah dilakukan melalui pembagian tugas sesuai tupoksi perangkat desa. Namun, keterbatasan SDM menyebabkan beberapa perangkat harus merangkap tugas. Selfiyanti Gea, Kasi Pemerintahan, mengungkapkan *“struktur kerja sebenarnya sudah ada, tetapi karena jumlah perangkat terbatas, koordinasi sering kurang efektif.”* Hal senada disampaikan oleh Setianus Gea yang menyebutkan bahwa *“administrasi sudah berjalan, tetapi staf terbatas membuat pekerjaan menumpuk.”* Dari sisi masyarakat, Fahela Gea menilai *“kami lihat ada pembagian kerja, tapi kadang yang kerja itu-itu saja.”* Selain itu, keterbatasan anggaran juga membuat pemerintah desa harus memprioritaskan program tertentu, seperti pembangunan jalan, sementara program pemberdayaan ekonomi masyarakat belum berjalan maksimal.

Pelaksanaan program yang bersifat fisik seperti pembangunan jalan dan fasilitas kesehatan berjalan cukup baik karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat melalui gotong royong. Kepala Desa menyampaikan bahwa *“program pembangunan jalan dan kesehatan berjalan baik karena masyarakat mau bergotong royong.”* Akan tetapi, pada program non-fisik seperti pemberdayaan ekonomi dan pertanian, partisipasi masyarakat rendah. Hal ini diakui oleh Fahela Gea, yang menyatakan *“program jalan sangat bermanfaat, tapi untuk kelompok tani kami merasa kurang mendapat bimbingan setelah program berjalan.”* Pernyataan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program lebih berhasil pada sektor infrastruktur dibandingkan sektor pemberdayaan.

Pengawasan dilakukan oleh perangkat desa melalui laporan pertanggungjawaban dan monitoring tahunan. Namun, pengawasan masyarakat belum terlibat secara aktif. Yosafati Gea menegaskan bahwa *“pengawasan memang dilakukan, tetapi belum ada tim independen dari masyarakat yang ikut mengawasi.”* Hal ini diperkuat oleh Selfiyanti Gea yang menuturkan *“pengawasan hanya lewat laporan rutin, jarang ada evaluasi langsung di lapangan.”* Dari sisi masyarakat, Medina Laoli menyampaikan bahwa *“kami hanya dengar laporan di gereja atau balai desa, tapi tidak melihat detail penggunaannya.”* Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan masih cenderung administratif dan kurang menyentuh aspek transparansi.

Evaluasi program dilaksanakan setiap akhir tahun dalam bentuk laporan tahunan. Namun, sifatnya masih formalitas. Selfiyanti Gea menyatakan bahwa *“evaluasi memang ada, tapi lebih kepada laporan administratif, belum menyentuh masalah secara mendalam.”* Masyarakat pun menegaskan hal yang sama. Dalizatulo Gea mengungkapkan bahwa *“evaluasi hanya disampaikan lewat laporan tahunan, bukan evaluasi bersama masyarakat.”* Dengan demikian,

evaluasi program belum sepenuhnya menjadi sarana perbaikan, melainkan sebatas kewajiban administrasi.

Faktor pendukung utama pelaksanaan program pemerintah desa adalah adanya dana desa, semangat gotong royong masyarakat, dukungan tokoh masyarakat, serta bantuan teknis dari pemerintah kota. Kepala Desa menegaskan bahwa *“dana desa dan gotong royong masyarakat menjadi kekuatan utama dalam melaksanakan program.”* Hal ini diperkuat oleh Selfiyanti Gea yang menyampaikan *“dukungan dari pemerintah kota sangat membantu, terutama dalam bentuk bimbingan teknis.”* Dari sisi masyarakat, Fahela Gea menambahkan bahwa *“kalau pembangunan jalan, kami semangat gotong royong.”*

Di sisi lain, faktor penghambat yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran, kurangnya SDM perangkat desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program non-fisik, serta minimnya sosialisasi program. Selfiyanti Gea menuturkan bahwa *“kurangnya sosialisasi membuat sebagian masyarakat tidak mengetahui program secara detail.”* Medina Laoli juga menyoroti bahwa *“pembagian bantuan tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan.”* Sedangkan Dalizatulo Gea menegaskan *“program air bersih sempat tertunda karena dana tidak cukup, padahal itu kebutuhan mendesak.”*

Dalam menghadapi hambatan, pemerintah desa melakukan beberapa langkah, antara lain dengan memprioritaskan program yang dianggap paling mendesak, mengajukan bantuan tambahan ke pemerintah kota, serta mendorong masyarakat untuk bergotong royong. Kepala Desa menyampaikan bahwa *“kami prioritaskan program yang paling penting, sisanya ditunda,”* sementara masyarakat menilai bahwa solusi sering dilakukan dengan cara gotong royong untuk menutupi kekurangan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi fungsi manajemen dalam pelaksanaan program pemerintah Desa Ombolata Idanoi telah berjalan, namun belum optimal. Secara umum, fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi telah diterapkan, tetapi masih menghadapi berbagai kendala di lapangan yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan pembangunan desa.

Pada fungsi perencanaan, pemerintah desa telah melaksanakan musyawarah desa (musdes) sebagai wadah partisipatif dalam menyusun program pembangunan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah sehingga hasil perencanaan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan seluruh warga. Keterbatasan sosialisasi, dominasi kelompok tertentu,

serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan perencanaan belum berjalan secara partisipatif dan optimal.

Dalam fungsi pengorganisasian, pembagian tugas perangkat desa telah dilakukan sesuai dengan struktur yang ada. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan terjadinya rangkap tugas dan kurang optimalnya pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, koordinasi antarperangkat desa juga masih lemah, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan program.

Pada fungsi pelaksanaan, program pembangunan fisik berjalan relatif baik karena didukung oleh partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong. Namun, program non-fisik seperti pemberdayaan masyarakat kurang optimal akibat rendahnya keterlibatan masyarakat dan kurangnya pendampingan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan program desa.

Fungsi pengawasan dan evaluasi telah dilakukan melalui laporan tahunan dan monitoring kegiatan. Akan tetapi, pengawasan masih bersifat administratif dan belum melibatkan masyarakat secara aktif. Evaluasi juga cenderung bersifat formalitas dan belum dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan program di masa mendatang, sehingga siklus manajemen belum berjalan secara maksimal.

Keberhasilan implementasi fungsi manajemen di Desa Ombolata Idanoi dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti ketersediaan dana desa dan semangat gotong royong, serta faktor penghambat seperti keterbatasan SDM, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas aparatur desa, serta perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi agar program pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan..

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Implementasi fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) di Desa Ombolata Idanoi sudah berjalan namun belum optimal. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa, tetapi keterlibatan masyarakat masih rendah. Pengorganisasian berjalan melalui struktur perangkat desa, namun terkendala jumlah SDM yang terbatas dan rangkap tugas. Pelaksanaan program fisik berjalan cukup baik berkat gotong royong, sedangkan program non-fisik

masih lemah. Pengawasan dan evaluasi lebih bersifat administratif, kurang menyentuh permasalahan di lapangan, serta minim partisipasi masyarakat.

2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan fungsi manajemen di Desa Ombolata Idanoi bersifat kompleks. Faktor pendukung meliputi adanya dana desa, semangat gotong royong, serta dukungan tokoh masyarakat dan pemerintah kota. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas dan jumlah SDM perangkat desa, lemahnya sosialisasi, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah terutama pada program non-fisik.

b. Saran

1. Pemerintah Desa Ombolata perlu meningkatkan penerapan fungsi manajemen secara lebih partisipatif. Perencanaan harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, dan kelompok marjinal, agar program lebih tepat sasaran. Pengorganisasian perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas perangkat desa, pembagian tugas yang proporsional, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas kerja.
2. Pemerintah desa perlu memaksimalkan faktor pendukung dan meminimalkan faktor penghambat dalam pembangunan. Dana desa dan semangat gotong royong harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan menggali potensi lokal dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih efektif dan mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, sehingga pembangunan desa berjalan lebih berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik desa Indonesia 2021. BPS RI.
- Bungin, B. (2020). Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya. Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.
- Drucker, P. F. (2007). The practice of management. HarperBusiness.
- Handoko, T. H. (2018). Manajemen. BPF E Yogyakarta.
- Hidayah, N. (2021). Pengaruh media sosial terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam program desa. *Jurnal Komunikasi Sosial*, 9(1), 55–62.
- Kotler, P. (2011). Manajemen pemasaran (13th ed.). Erlangga.
- Kurniawan, D. (2022). Efektivitas penggunaan software akuntansi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Desa*, 4(2), 44–58.
- Lestari, D. (2022). Adaptabilitas perencanaan pembangunan desa terhadap perubahan kebijakan. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 22–30.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.

- Nasution, S. L., & dkk. (2023). Dasar-dasar manajemen: Teori dan praktik. Rajawali Pers.
- Nurhayati, S. (2021). Partisipasi masyarakat dalam implementasi program pemerintah desa. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 6(1), 12–25.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putri, A. Y. (2023). Efektivitas sosialisasi program desa melalui tokoh pemuda. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 18–26.
- Rachmawati, A. (2023). Monitoring real-time program desa berbasis teknologi. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 3(1), 33–42.
- Rahman, T. (2020). Keterbatasan komunikasi pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 41–53.
- Santoso, B. (2021). Pengaruh perencanaan program desa terhadap pengentasan kemiskinan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 9(2), 75–83.
- Santoso, H. (2023). Aplikasi mobile untuk pelaporan masyarakat desa. *Jurnal Inovasi Pemerintahan Digital*, 2(1), 9–19.
- Sari, R. (2021). Kompetensi kepala desa dan implikasinya terhadap pelaksanaan program. *Jurnal Manajemen Publik dan Pemerintahan*, 4(2), 63–77.
- Siagian, S. P. (2015). *Manajemen strategik*. Bumi Aksara.
- Sonya Liani Nasution, & dkk. (2023). *Manajemen publik: Konsep dan implementasi*. UNIMED Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyadi, H. (2021). Dampak perubahan kebijakan terhadap pembangunan desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Desa*, 5(2), 77–84.
- Supriyanto, A. (2020). Pembangunan desa berbasis potensi lokal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Pedesaan*, 3(2), 51–66.
- Wibowo, A. E. (2021). *Metodologi penelitian manajemen publik*. Prenada Media Group.
- Wibowo, A. (2020). Kapasitas kelembagaan dan keberhasilan program desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 27–39.
- Wibowo, A. (2022). Peningkatan kompetensi SDM desa melalui pelatihan manajemen. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 4(2), 16–24.